

Mantan Walikota Sorong Berharap Pj Gubernur PBD Rangkul Semua Pihak

Kualisi tim deklarator presidium dan percepatan Provinsi Papua Barat Daya rencananya akan menggelar aksi demo damai, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu sampai Jumat (15-17/3). Aksi demo tersebut dilakukan untuk mengkritik kinerja dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, yang dinilai gagal total dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehubungan dengan adanya rencana aksi demo tersebut, mantan Walikota Sorong 2 periode Lambert Jitmau angkat bicara. Dikatakan Lambert, dirinya sangat menyayangkan jika sampai ada aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengkritik kinerja Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. "Saya sangat menyesalkan adanya rencana aksi demo yang akan dilaksanakan selama tiga hari. Kalau sampai demo benar-benar terjadi, maka Kota Sorong bisa lumpuh dan semua aktivitas tidak akan berjalan," ungkap Lambert Jitmau saat ditemui di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (15/3). Menurut Lambert, sebagai mantan Walikota Sorong dan juga mantan pejabat di kota ini, dirinya tidak mau kalau sampai demo terjadi. "Saya inginkan agar Kota Sorong dijaga dengan baik, karena masyarakat yang ada di Kota Sorong adalah masyarakat heterogen. Makanya semua harus punya tanggung jawab untuk menjaga kota ini agar tetap aman. Kota Sorong aman dan tertib, maka semua aktivitas, pelayanan pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong rusuh, maka apa yang bisa kita harapkan," ujarnya. Sehubungan dengan adanya rencana aksi demo, kata Lambert, maka Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang dipercayakan untuk memimpin daerah ini harus bisa melihat ini bukan hal yang luar biasa tapi hal yang biasa saja. "Saya berharap Penjabat Gubernur Papua Barat Daya bisa bergandengan tangan dan bersatu hati, untuk merangkul semua adik-adik yang akan menggelar aksi demo damai ini. Adik-adik ini harus dirangkul, kita harus bersama membangun negeri ini kedepan. Riak-riak yang ada itu saya baru tahu kemarin sore," imbuhnya. Kata Lambert, sebagai orang tua dan pemimpin, maka Penjabat Gubernur Papua Barat Daya harus bisa merangkul semua pihak. Perbedaan persepsi itu wajar dan harus dijadikan satu kekuatan, untuk bangun Provinsi

Papua Barat Daya. "Adik-adik ini jangan jadi penonton di negeri ini, tapi mereka juga harus jadi pemain di lapangan hijau. Jangan jadikan mereka penonton di Tribun. Adik-adik yang punya kemampuan, pangkat, jabatan dan punya keahlian harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. Mereka Jangan dibiarkan dari waktu ke waktu, karena mereka akan teriak. Kalau bisa mari kita rangkul dengan memberikan tugas kepada siapa mengerjakan apa dan hasilnya apa, untuk pembangunan di tanah ini," harapnya. Mantan Walikota Sorong berharap semua harus bersatu dan kompak, untuk membangun negeri dan tanah ini. Papua, sambungnya, bukan untuk ditangisi. Tapi Papua harus dibangun dan butuh pemimpin yang tegas serta arif dalam pengambilan keputusan. "Provinsi Papua Barat Daya jangan di otak-atik, karena Provinsi Papua Barat Daya dihadirkan untuk seluruh masyarakat Sorong Raya," pungkasnya.